

Jelang 2019, Pemerintah Batalan 14 Proyek Infrastruktur

SELASA, 17 APR 2018 09:34 | EDITOR : ILHAM SAFUTRA



Pengerjaan jalan tol Depok Antasari yang masih berlangsung. (Ismail Pohan/Indopos)

Berita Terkait

- [Keren, Pemudik Lebaran 2018 Bisa Melintas Seluruh Tol Trans Jawa Loh!](#)
- [Tinjau Stadion GBK, Menteri Basuki: Kok Bisa Punya Sendiri Dirusak](#)
- [Tangis Menteri Basuki Saat Tahu Stadion GBK Dirusak Oknum Suporter](#)

JawaPos.com - Di ujung sisa masa pemerintahan Jokowi-JK yang habis pada 2019, pemerintah sepakat merevisi daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (16/4). Hasilnya, ada 14 proyek infrastruktur yang batal dibangun.

Ke 14 proyek itu di antaranya kereta api Jambi-Palembang, pembangunan rel kereta api Provinsi Kalimantan Timur, dan sistem penyediaan air minum regional di Sumatera Utara. Selain itu, ada juga Bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara, dan kawasan ekonomi khusus Merauke.

Namun di saat bersamaan, pemerintah menambah satu [proyek](#) dan satu program pada PSN tahun ini. Yakni pembangunan Universitas Islam Internasional dan program pemerataan ekonomi.



Proyek Tol Becakayu yang sempat makan korban karena kelalaian. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, penghapusan 14 PSN itu dilakukan setelah melihat progres perkembangannya selama ini. Berdasarkan laporan menteri terkait, [14 proyek](#) tersebut sulit untuk dimulai pembangunannya hingga akhir periode 2019 mendatang.

"Suatu proyek strategis nasional akan dipertahankan kalau ada [pembangunan fisik](#), ada konstruksi paling lambat Kuartal III 2019," ujarnya saat konferensi pers.

Sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) 58 tahun 2017 tentang PSN, ada 245 proyek infrastruktur dan dua program yang dicanangkan pemerintah dalam program strategis.

Di luar 14 proyek yang dibatalkan, lanjut Darmin, proyek lainnya berjalan lancar. Bahkan, ada 10 di antaranya sudah selesai. Sementara sisanya ada dalam proses konstruksi, maupun akan memulai konstruksinya hingga tahun depan.

Untuk diketahui, perubahan PSN sendiri bukan yang pertama kali. Pada kuartal I 2017, pemerintah juga melakukannya. Awalnya, lanjut Darmin, pada 2016 ada 225 proyek dan satu program yang dicanangkan dalam PSN. Dalam prosesnya, ada 20 proyek yang selesai di tahun 2016, 15 di tahun 2017, dan 15 lainnya dibatalkan.

Namun pada saat bersamaan, pemerintah menambah 55 proyek dan satu program. Totalnya 245 proyek dan dua program sebagaimana Perpres 38 tahun 2017.

Nah, dengan pembatalan 14 proyek, 10 proyek selesai, dan penambahan satu proyek serta satu program tahun ini, maka total PSN tahun ini menyisakan 222 proyek dan tiga program.

Darmin menambahkan, meski 14 proyek itu dibatalkan, bukan berarti pembatalan tersebut bersifat permanen. Suatu saat, jika kondisinya memungkinkan, pemerintah selanjutnya bisa merencanakannya kembali. "Kalau nanti di Kementerian nya atau daerahnya mempersiapkan kembali dan sudah lebih siap, Maka mereka bisa diajukan kembali," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, persoalan yang dihadapi 14 proyek yang dibatalkan sangat beragam. Bendungan Telaga Waje Bali misalnya, dibatalkan karena kondisi tata ruangnya sudah berubah. "Ternyata sudah dibikin izin waktu pak bupati yang dulu ini izin untuk hotel," ujarnya.

Begitu juga untuk kereta api Kalimantan timur, proyek itu sengaja dibatalkan akibat tidak ada investor yang tertarik. "Tidak ada investasi yang masuk," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan.

(jpk/far/JPC)